

LAPORAN TESIS
PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PSIKOTIK DI RSJD DR.
AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH



REZKY PUTRI WAHYU AGUSTINE
NIM. 21.C2.0138

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS PASCASARJANA HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2025

LAPORAN TESIS
PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PSIKOTIK DI RSJD DR.
AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH



REZKY PUTRI WAHYU AGUSTINE
NIM. 21.C2.0138

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS PASCASARJANA HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2025

ABSTRAK

Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu rumah sakit jiwa tingkat provinsi yang memiliki potensi terhadap permasalahan *Informed Consent* pada pasien Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkaitan terhadap norma pada ketentuan Pasal 80-83 Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menimbulkan implikasi pada prakteknya dimana penulis menjumpai dalam kondisi tertentu, ODGJ yang memerlukan tindakan medis dengan persetujuan namun ODGJ tersebut tidak bisa diberikan suatu informasi dan pendapat.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur pelaksanaan *informed consent* pada pasien ODGJ di Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui serta menganalisis Pelaksanaan *informed consent* pada ODGJ di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis tesis ini adalah **yuridis sosiologis**. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terkait *informed consent*, khususnya pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sekaligus menganalisis implementasinya di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) RSJD Dr. Amino Gondohutomo telah menerapkan SOP *Informed Consent* (Keputusan Direktur Nomor 445.3/105.12/2022) yang mengatur prinsip dan tata cara persetujuan, termasuk mekanisme pelibatan keluarga jika pasien ODGJ tidak cakap, serta penggunaan PPDGJ III untuk diagnosis. Secara konseptual, SOP ini telah dirumuskan agar sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 80 UU Kesehatan dan Pasal 158 PP 28/2024. (2) Pada pelaksanaannya, analisis 65 dokumen rekam medis rawat inap mengungkapkan ketidaklengkapan dokumentasi signifikan. Tanda tangan keluarga pasien sebagai pemberi persetujuan tidak lengkap pada 19 formulir (29%), dan tanda tangan petugas medis tidak lengkap pada 10 formulir (15%). Meskipun tanda tangan pihak yang menyatakan (yang mewakili pasien/keluarga) hampir seluruhnya terisi (98%), ketidaklengkapan ini tetap menjadi catatan penting yang berimplikasi pada melemahnya validitas bukti hukum persetujuan tindakan medis. Kesenjangan antara SOP formal dan dokumentasi pelaksanaan ini menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Informed Consent*, ODGJ, RSJD Dr. Amino Gondohutomo

ABSTRACT

Dr. Amino Gondohutomo Mental Hospital, Central Java Province, is a provincial-level mental hospital with potential issues related to informed consent among patients with mental disorders (ODGJ). This is related to the provisions of Articles 80-83 of Law No. 17 of 2023 concerning Health, which has implications for practice. The author encountered certain conditions where ODGJ required medical treatment with consent, but the ODGJ could not provide information or opinions.

The purpose of this study was to determine the Standard Operating Procedures (SOPs) for implementing informed consent for ODGJ patients at Dr. Amino Gondohutomo Mental Hospital, Central Java Province, and to determine and analyze the implementation of informed consent for ODGJ at Dr. Amino Gondohutomo Mental Hospital, Central Java Province.

The research method used to analyze this thesis is a juridical-sociological approach. This approach allows the researcher to examine applicable legal provisions regarding informed consent, specifically for people with mental disorders (ODGJ), while simultaneously analyzing its implementation at Dr. Amino Gondohutomo Mental Hospital, Central Java Province.

The results of the study indicate that (1) Dr. Amino Gondohutomo Mental Hospital has implemented an Informed Consent Standard Operating Procedure (SOP) (Director's Decree Number 445.3/105.12/2022) that regulates the principles and procedures for consent, including the mechanism for involving families if a patient with mental disorders is incompetent, as well as the use of PPDGJ III for diagnosis. Conceptually, this SOP has been formulated to comply with Law Number 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation Number 28 of 2024, specifically Article 80 of the Health Law and Article 158 of Government Regulation 28/2024. (2) In practice, an analysis of 65 inpatient medical record documents revealed significant documentation incompleteness. The signature of the patient's family as the consent giver was incomplete on 19 forms (29%), and the signature of the medical staff was incomplete on 10 forms (15%). Although the signature of the declarant (representing the patient/family) was almost completely filled in (98%), this incompleteness remains a significant concern, weakening the legal validity of consent for medical treatment. This gap between formal SOPs and implementation documentation indicates the need for continuous improvement.

Keywords: Informed Consent, People with Mental Disorders, Dr. Amino Gondohutomo Mental Hospital